

**Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di
Masa Pandemi
Lokot Zein Nasution**

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
Gedung R.M Notohamiprodjo, Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

Abstrak

Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga sosial, politik, keamanan, dan terutama pada sektor ekonomi. Beragam studi empiris membuktikan bahwa pandemi Covid-19 telah menurunkan tingkat permintaan pasar secara signifikan akibat pembatasan kegiatan sosial dan transaksi perdagangan. UMKM adalah salah satu pelaku usaha yang paling terdampak, dan mengancam usaha dalam jangka panjang. Sumber permasalahan adalah rendahnya aksesibilitas pembiayaan, termasuk belum optimalnya potensi pemanfaatan pembiayaan syariah di masa pandemi. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi bagaimana peranan lembaga pembiayaan syariah yang bisa dilakukan dalam mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi. Berdasarkan studi *literature review*, didapatkan bahwa pembiayaan syariah mempunyai keunggulan berupa prinsip berbagi risiko untuk mengatasi kerentanan usaha UMKM. Keunggulan lain terletak pada pedoman syariah yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam pembiayaan syariah tidak ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak lain, dan tidak ada perlakuan yang sepihak atau represif kepada pihak lain. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki, pembiayaan syariah harus dikondisikan agar sesuai dengan kebutuhan usaha (*business nature*), dilengkapi dengan model pemberdayaan sebagai bagian dari skema pembiayaan UMKM. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong ekosistem keuangan syariah sebagai fondasi dalam mengembangkan lembaga pembiayaan syariah untuk mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Keunggulan Pembiayaan Syariah, dan UMKM

Abstract

Covid-19 pandemic has not only impacted the health sector, but also social, political, security, and especially the economic sector. Various empirical studies prove that the Covid-19 pandemic has significantly reduced market demand due to social activities and trade transactions. SMEs are one of the most powerful business actors, and a threat to business in the long term. The source of the problem is the low accessibility of financing, including the non-optimal use of sharia financing during the pandemic. how this can be done to find and explore Islamic financing institutions that can be done in the recovery of pandemic MSMEs. Based on a review of the study literature, it was found that Islamic financing has advantages in the form of the principle of risk sharing to overcome the vulnerability of SMEs businesses. Another advantage lies in sharia guidelines that are in accordance with democracy, and the application of the precautionary principle. In Islamic financing, there is no party who benefits above the loss of the other party, and there is no unilateral or repressive treatment to other

parties. The advantage it has is that Islamic financing must be conditioned to suit business needs, equipped with an empowerment model as part of the SMEs financing scheme. For this reason, the government needs to encourage the Islamic finance ecosystem as a foundation in developing Islamic financing institutions for the recovery of SMEs during the pandemic.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Excellence in Sharia Financing, and SMEs

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kemunculan coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) atau disebut Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi, yaitu wabah penyakit yang terjadi secara serempak mencakup keseluruhan geografis di dunia¹. Pandemi bukan hanya masalah kesehatan, namun dampak multiplier yang ditimbulkan sangat luas, baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, bahkan perubahan konstelasi politik². Fakta empiris membuktikan bahwa pandemi berdampak destruktif terhadap perekonomian, seperti kasus *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang disebabkan SARS-Coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) pada tahun 2012. Tingkat mortalitas SAR sekitar 10 persen dan MERS lebih tinggi yaitu sekitar 40 persen³. Implikasi yang ditimbulkan adalah penurunan pertumbuhan produktivitas akibat pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Sampai 30 Juni 2021, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2,17 juta kasus, yang meninggal mencapai 58.491 jiwa, dan sembuh sebesar 1,88 juta jiwa. Sementara untuk tingkat global, kasusnya mencapai 182 juta kasus, yang meninggal 3,9 juta jiwa, dan sembuh sebesar 167 juta jiwa⁴. Dampaknya, pandemi Covid-19 menciptakan efek domino di berbagai sektor, terutama pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga berpengaruh sangat signifikan terhadap penurunan kinerja perekonomian⁵. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 saat pertama kali terjadi penyebaran pandemi minus sebesar -2,07 persen, kemudian kuartal pertama (Q1) tahun 2021 masih minus sebesar -0,74 persen, dan proyeksi untuk kuartal kedua (Q2) akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 7 persen⁶. Meski sudah terdapat

¹ www.ners.unair.ac.id. 2021. Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi. Online. <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.

² Hadiwardoyo, W. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA, Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92, jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara.

³ Yuliana. 2020. Corona Virus Deasese (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187-192, <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>.

⁴ www.tribunnews.com. 2021. Update Corona Global 30 Juni 2021: Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Lebih dari 3,9 Juta. Online. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/30/update-corona-global-30-juni-2021-jumlah-kematian-akibat-covid-19-lebih-dari-39-juta>.

⁵ Hakim, L., Aureli, A.B.P., Adam, Z., Sagita, I.A., Anisah, F.N., Nusantara, C.T.A., & Amin, A.A. 2021. Analisa keberlanjutan BMT dalam pandemi covid 19 berbasis bisnis model dan pemilihan pelayanan anggota pembiayaan (selective lending). *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 17-33. <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/article/view/1135/1120>.

⁶ www.ekonomi.bisnis.com. 2021. Covid-19 Mengganas, Bos BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021. Online. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210705/9/1413729/covid-19-mengganas-bos-bi-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii2021>.

tanda-tanda pemulihan pada Q2 tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi ke depan masih sulit diprediksi, mengingat masih terdapat potensi kenaikan kasus Covid-19 akibat kecepatan munculnya varian virus baru dan semakin longgarnya protokol kesehatan.

Salah satu dampak yang paling dirasakan akibat pandemi Covid-19 adalah pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kasus di tingkat global, pandemi Covid-19 hingga kuartal kedua tahun 2020 menyebabkan lebih dari 400 juta pekerja penuh waktu kehilangan pekerjaan⁷. Kasus di Timur Tengah, pandemi Covid-19 menyebabkan para pelaku UMKM mengalami dua jenis kesulitan, yaitu⁸: (i) kesulitan operasional, seperti penurunan akses bahan baku, penurunan produksi, dan perubahan minat pelanggan; dan (ii) kesulitan keuangan, seperti rendahnya penjualan, arus kas yang rendah, dan penurunan omset akibat penurunan permintaan. Sementara untuk kasus di Afrika, pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan rata-rata UMKM pada tahun 2020 negatif sebesar -5,1 persen, hingga menyebabkan resesi terburuk selama 25 tahun terakhir⁹. Sementara untuk kasus di Eropa, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian UMKM pada tingginya risiko pasar, keuangan, dan akses tenaga kerja¹⁰. Keterbatasan akses terutama disebabkan pencegahan pandemi melalui pembatasan kegiatan ekonomi dan penutupan berbagai negara, sehingga mobilitas transaksi perdagangan lintas negara menjadi berhenti.

Kasus di Indonesia, penyebaran pandemi mengakibatkan lebih dari 50 persen UMKM mengalami kebangkrutan akibat guncangan permintaan (*demand side*)¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kinerja UMKM yang bergerak dalam produksi makanan minuman skala mikro sebesar 27 persen, untuk skala kecil sebesar 1,77 persen, dan usaha menengah sebesar 0,07 persen. Untuk jenis UMKM produksi kerajinan, dampaknya terhadap skala mikro sebesar 17,03 persen, skala kecil sebesar 1,77 persen, dan skala menengah sebesar 0,01 persen¹². Penurunan kinerja UMKM diantaranya dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, perolehan omset, permintaan, dan aksesibilitas bahan baku. Hasil lain menemukan bahwa peluang untuk meningkatkan transaksi perdagangan digital (*ecommerce*) produk UMKM pada situasi pandemi nyatanya tidak naik signifikan. Perilaku masyarakat yang konservatif belum begitu mampu bergeser ke pola transaksi belanja secara digital, sehingga permintaan atas produk dan jasa dari UMKM masih terus menurun¹³. UMKM selama ini terkendala dengan beban biaya yang terus

⁷ *Ibid.*

⁸ Nawaiseh, K.H. 2021. The Effect Of Covid-19 Pandemic On Smes Management In Jordan. *Journal of contemporary issues in business and government*, 27(1), 20-29, https://www.researchgate.net/publication/348976086_The_Effect_Of_COVID-19_Pandemic_On_SMEs_Management_In_Jordan.

⁹ Muriithi, S.M. 2021. The impact of covid-19 on african smes, possible remedies and source of funding. *European Journal of Research and Reflection in Management Science*, 9(1), 1-12, https://www.researchgate.net/publication/348994142_THE_IMPACT_OF_COVID-19_ON_AFRICAN_SMES_POSSIBLE_REMEDIES_AND_SOURCE_OF_FUNDING.

¹⁰ Cepel, M., Gavurova, B., Dvorsky, J., & Belas, J. 2020. The Impact Of The Covid-19 Crisis On The Perception of Business Risk In The Sme Segment. *Journal of International Studies*, 13(3), 248-263. https://www.jois.eu/files/16_1021_Cepel%20et%20al.pdf.

¹¹ Sari, R., Bulutoding, L., Aditiya, R., & Jannah, R. 2020. Equity Crowdfunding For SMEs: Sharia Compliance Challenge Amid the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Iqtisaduna*, 6,(2), 198-213.

¹² Amri, A. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/605>.

¹³ *Ibid.*

meningkatkan, terutama dari beban pinjaman modal dan beragam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Strategi untuk mengangkat kinerja UMKM di masa pandemi sudah banyak diteliti, khususnya mengaitkan dengan empat aspek utama, yaitu¹⁴: (i) meningkatkan aksesibilitas bahan baku; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi; (iii) meningkatkan aksesibilitas pemasaran; dan (iv) meningkatkan aksesibilitas permodalan. Berdasarkan empat aspek tersebut, aksesibilitas permodalan dinilai menjadi aspek yang paling krusial. Kasus di beberapa negara, aksesibilitas terhadap permodalan dinilai mempunyai efek paling determinan terhadap kebangkitan UMKM di masa pandemi, terutama dalam mendorong pembiayaan strategi bisnis untuk mengakselerasi inovasi usaha dari hulu hingga hilir. Contoh dari inovasi usaha diantaranya aspek efisiensi bahan baku, produksi, penjualan, dan akses pasar. Untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM, dibutuhkan pendalaman dan inklusi keuangan (*financial deepening & inclusion*)¹⁵. Pendalaman keuangan adalah upaya meningkatkan penyediaan layanan jasa keuangan secara lebih luas dan akses yang lebih baik untuk kelompok sosial ekonomi yang berbeda¹⁶. Sementara inklusi keuangan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal yang efisien dan efektif¹⁷.

Salah satu strategi dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan adalah melalui diversifikasi keuangan, termasuk jenis permodalan yang dibedakan menjadi konvensional dan syariah. Sumber pembiayaan konvensional dinilai menawarkan model pembiayaan yang standar, sehingga pendalaman keuangan bagi UMKM menjadi kurang optimal¹⁸. Beberapa argumen mengusulkan pentingnya memperdalam aksesibilitas pembiayaan syariah bagi UMKM dalam menghadapi *shock* eksternal akibat pandemi Covid-19. Pengembangan pembiayaan syariah adalah salah satu upaya dalam meningkatkan pendalaman dan inklusi keuangan, diversifikasi produk keuangan, dan dinilai relatif mempunyai keunggulan dibandingkan produk keuangan konvensional. Beberapa kelebihan tersebut diantaranya adalah prinsip keadilan, pemerataan, berbasis pada etika dan moral, anti ribawi, menghindari judi dan spekulasi (*maysir*), dan menghindari ketidakpastian (*gharar*)¹⁹. Selain itu, pembiayaan syariah lebih berpotensi menciptakan mekanisme pemberdayaan dalam transaksi keuangan atau pinjam meminjam²⁰.

Meski demikian, peranan pembiayaan syariah selama ini masih belum banyak diangkat dalam berbagai diskursus bagi percepatan pemulihan UMKM di masa pandemi. Hal ini akibat masih rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah yang sebenarnya sangat potensial. Diagnosa atas urgensi kebutuhan pembiayaan syariah dapat dilihat dari kondisi UMKM yang ditimbulkan akibat pandemi, dimana masih

¹⁴ Vidal, G.G., Vilar, L.G., Rodriguez, A.S., Vivar, R.M., Campdesuner, R.P., & Ruiz, F.U. 2020. Facing Post Era Covid-19 Era, What Is Really Important For Ecuadorian Smes?. *International journal of Engineering Business Management*, 12, 01-09, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1847979020971944>.

¹⁵ Anggraini, R., & Putri, D.A. 2020. Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelusik Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease-19. *Jurnal Bonanza: Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 80-97.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nugrahana, Y.R.Y., & Zaki, I. 2020. The Role Of Micro Waqf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(9), 1.731-1.742.

membutuhkan inklusi dan pendalaman keuangan secara massif. Fokus yang ditekankan adalah pentingnya meningkatkan peranan lembaga pembiayaan syariah bagi pemulihan UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka maksud dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi bagaimana peranan lembaga pembiayaan syariah yang bisa dilakukan dalam mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi. Berdasarkan maksud tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menjawab tiga hal, yaitu: (i) menganalisis bagaimana kondisi UMKM di masa pandemi; (ii) memetakan bagaimana peranan yang bisa dijalankan oleh lembaga pembiayaan syariah bagi pemulihan UMKM di masa pandemi; dan (iii) menyusun langkah-langkah yang bisa mengoptimalkan peranan lembaga pembiayaan syariah dalam mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi. Tulisan ini tidak didasarkan pada penelitian empiris, namun mengeksplorasi melalui penggunaan metode deskriptif berbasis pengolahan data sekunder dan didukung oleh analisis naratif eksploratif berbasis *literature review*.

B. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perekonomian

Secara teoritis, kinerja suatu perekonomian tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal, namun juga faktor eksternal²¹. Cakupan dari faktor internal diantaranya adalah sumberdaya, baik permodalan, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya pendorong kegiatan ekonomi lainnya. Sementara cakupan dari faktor eksternal adalah lingkungan yang tidak bersentuhan langsung dengan sumberdaya ekonomi, diantaranya adalah sosial, politik, keamanan, dan termasuk kesehatan. Pandemi Covid-19 merupakan persoalan kesehatan yang tercipta dari faktor eksternal, namun dampaknya terhadap faktor internal sangat signifikan, sehingga kinerja perekonomian bisa menurun dalam waktu yang sangat cepat²².

Dari sisi historis, pandemi sebagai persoalan kesehatan selalu menimbulkan efek negatif bagi kondisi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh penyebarannya yang bersifat massif dalam satu waktu, dan menyasar hampir semua wilayah geografis di tingkat global²³. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dipandang sebagai persoalan multidimensi, baik dari dimensi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Beragam kasus empiris di berbagai negara membuktikan bahwa dampak paling besar dari pandemi Covid-19 terutama terjadi pada sektor transportasi, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan beragam sektor penting lainnya²⁴. Selain itu, upaya pencegahan pandemi Covid-19 menimbulkan konsekuensi yang besar akibat pembatasan aktivitas dan penutupan wilayah. Kebijakan penutupan wilayah dilakukan semata untuk mencegah penularan, namun berkorelasi negatif terhadap kinerja transaksi perdagangan, sehingga kegiatan bisnis terhambat dan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi²⁵.

Efek lain dari pandemi Covid-19 adalah sering terjadinya penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. Penurunan harga komoditas dilakukan untuk mendorong kenaikan permintaan, begitupun dampak terhadap volatilitas pasar keuangan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Supriatna, E. 2020. Socio-Economic Impacts Of The Covid-19 Pandemic: The Case Of Bandung City. *Journal of Governance*, 5(1), 61-70.

²⁴ Susilawati., Falefi, R., & Purwoko, A. 2020. Impacts Of Covid-19's Pandemic On The Economy Of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1147-1156.

²⁵ *Ibid.*

sebagai respons dari perubahan sisi permintaan. Dampak lain yang ditimbulkan adalah tendensi terjadinya kenaikan inflasi karena terbatasnya pasokan bahan pangan dan depresiasi mata uang²⁶. Dengan kondisi yang tidak pasti, pemerintah harus memberikan alokasi fiskal yang besar terhadap jaring pengaman sosial, khususnya subsidi terhadap energi (listrik, bahan bakar) dan pangan. Berbagai negara melakukan *refocusing* dan *rebudgeting*, serta mengeluarkan paket stimulus yang diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor riil. Kasus di Indonesia, pandemi Covid-19 menghadapkan pemerintah harus memprioritaskan alokasi fiskal pada dukungan sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial, dan sektor bisnis keselamatan²⁷.

Kasus di Indonesia, kondisi kerentanan yang paling berdampak dari pandemi Covid-19 adalah sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa lapangan usaha yang paling terdampak adalah sektor akomodasi makan dan minum, transportasi, ritel, dan industri pengolahan, yang semuanya menunjukkan defisit transaksi berjalan²⁸. Pelaku usaha yang paling berdampak adalah pekerja harian, pelaku usaha informal, dan para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM mengandalkan pemasukan harian untuk produksi jangka pendek. Dengan pembatasan kegiatan sosial, permintaan terhadap produk dan jasa UMKM semakin menurun, dan siklus bisnisnya menjadi terhambat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak pelaku UMKM yang gulung tikar, dan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi demikian berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran sejalan dengan penurunan pendapatan masyarakat. Beragam kondisi tersebut menegaskan bahwa dampak dari sebuah pandemi bisa mereduksi kinerja perekonomian secara signifikan, terutama hantamannya bagi para pelaku UMKM.

C. Karakteristik UMKM di Indonesia

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan kinerja UMKM sangat signifikan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik UMKM yang dikategorikan sebagai pelaku usaha yang rentan. Kerentanan UMKM dapat dilihat dari model bisnis yang sering keluar masuk pasar akibat tingkat kompetisi yang tinggi²⁹. Tingginya tingkat kompetisi dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelaku UMKM dengan karakteristik produk dan jasa yang hampir seragam. Hal ini diperparah dengan persoalan keterbatasan sumberdaya, baik dari aksesibilitas bahan baku, inovasi produksi, aksesibilitas pemasaran, dan keterbatasan permodalan³⁰. Keterbatasan aksesibilitas bahan baku sering disebabkan oleh keterbatasan jaringan kemitraan dan informasi pasar. Rendahnya inovasi produksi disebabkan oleh rendahnya ketersediaan sumberdaya manusia dan manajerial. Terbatasnya aksesibilitas pemasaran lebih didominasi oleh informasi pasar yang asimetris. Sedangkan keterbatasan permodalan disebabkan kurangnya kelayakan sumberdaya usaha dalam mengakses kredit atau pembiayaan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lekhaya, L.M. 2016. Business Characteristics Of Small And Medium Enterprises In Rural Areas: A Case Study On Southern Region Of Kwazulu-Natal Province Of South Africa. *Problems and Perspectives in Management*, 14(3), 108-114.

³⁰ Dewi, L., & Christian, S. 2017. The Effect Of Entrepreneurial Attitude And Managers Business Ability On Smes Organizational Performance. *Journal of Entrepreneur and Entrepreneurship*, 6(1), 13-16.

Karakteristik lain dari kerentanan UMKM adalah skala usaha yang sangat kecil, mikro dan ultra mikro. Hasil studi menunjukkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan cenderung meningkat jika skala usahanya relatif lebih besar, begitupun sebaliknya³¹. Dengan skala usaha yang rendah, peluang UMKM dalam mendorong kinerja usaha relatif terbatas. Konsep tersebut didasarkan pada hipotesis bahwa pengembangan kinerja usaha dilandaskan pada perspektif tingkatan (skala) sumberdaya yang dimiliki, perspektif motivasi, perspektif adaptasi strategis, dan perspektif konfigurasi antar mitra jaringan. Beberapa perspektif tersebut mengukur kerentanan UMKM disebabkan oleh tinggi rendahnya skala usaha dan sumberdaya, seperti sempitnya jangkauan pasar, keuangan yang terbatas, biaya bahan baku yang tinggi, kurangnya keterampilan teknis dan bisnis, serta kendala layanan komunikasi dan transportasi.

Persoalan UMKM yang umum ditemui biasanya tertuju pada masih rendahnya ketersediaan SDM, khususnya kewirausahaan³². Argumentasi tersebut sudah banyak diyakini oleh berbagai peneliti, dan menjadikan rendahnya kewirausahaan sebagai faktor determinan penyebab tingginya kerentanan UMKM. Kewirausahaan merupakan salah satu karakteristik penting yang harus dimiliki para pelaku UMKM untuk meningkatkan posisinya dalam jaringan produksi³³. Hasil studi di negara-negara ASEAN dengan kategori UMKM yang sudah relatif maju (seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand) menemukan bahwa kewirausahaan yang kuat mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya dan keuangan, peningkatan pelanggan dan akses pasar, dan mampu berpengaruh terhadap lingkungan eksternal seperti dampak kewirausahaan terhadap transformasi sosial³⁴. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kewirausahaan yang diukur dari usia pengusaha, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan perencanaan bisnis menjadikan operasional bisnis kurang efisien dan dipandang sebagai persoalan utama rendahnya ekosistem industri³⁵.

Meski demikian, selain faktor kewirausahaan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor determinan lain dari tingginya kerentanan UMKM terletak pada terbatasnya aksesibilitas pembiayaan³⁶. Kasus di Indonesia, rendahnya aksesibilitas pembiayaan rata-rata disebabkan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Isu utama tertuju masih rendahnya inklusi dan pendalaman keuangan.

D. Kondisi UMKM di Masa Pandemi

Penjelasan sebelumnya menguraikan bahwa karakteristik UMKM masih lekat dengan beragam risiko usaha, sehingga peristiwa pandemi Covid-19 akan menciptakan efek domino bagi penurunan kinerja UMKM. Dampak yang dirasakan oleh UMKM saat situasi pandemi mengakibatkan peranannya dalam membentuk pemerataan pembangunan menjadi tereduksi³⁷. Selain pemerataan pembangunan, peranan UMKM juga mencakup penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan penciptaan nilai tambah ekonomi lokal. Kasus di Indonesia, selama ini kontribusi UMKM terhadap total

³¹ *Ibid.*

³² Alharbi, R.K., Yahya, S.B., & Ahmed, E.R. 2018. Characteristics Of Manager's And Smes Performance: The Role Of Access To Finance As A Moderator. *International journal of Engineering & Technology*, 7(4), 5115-5119.

³³ Belas, J., Gavurova, B., & Toth, P. 2018. Impact Of Selected Characteristics Of Smes On The Capital Structure. *Journal of Business Economics and Management*, 19(4), 592-608.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

penyerapan tenaga kerja nasional mencapai 77,6 juta orang atau sekitar 96,77 persen. Artinya, akan terdapat efek multiplier terhadap gelombang pengangguran ketika banyak UMKM terancam kolaps akibat pandemi Covid-19³⁸. Selain itu, dari total Produk Domestik Bruto (PDB), peranan UMKM mencapai Rp. 2.121 Triliun atau sekitar 53,6 persen dari total PDB³⁹. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perekonomian nasional didominasi oleh peranan UMKM. Artinya, peran dan fungsi UMKM dalam menciptakan *valued added* bagi perekonomian nasional berpotensi terdegradasi secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Sejumlah UMKM untuk bertahan harus melakukan sejumlah efisiensi, seperti⁴⁰: (i) mengurangi jam kerja, upah, dan jumlah karyawan; (ii) mengurangi saluran penjualan; dan (iii) menurunkan tingkat produksi. Langkah tersebut berdampak multiplier terhadap pengurangan tenaga kerja di subsektor pendukung, dan rendahnya nilai tambah dalam perekonomian lokal.

Daya tahan UMKM dalam menghadapi pandemi sebenarnya sangat tergantung dari daya saingnya. Pengertian daya saing adalah kemampuan entitas usaha dalam menciptakan keunggulan yang digunakan untuk bersaing pada pasar tertentu⁴¹. Daya saing mencerminkan kemampuan UMKM dalam melakukan kompetisi pada segmen pasar tertentu sesuai dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Tingginya daya saing UMKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan SDM yang terampil, penguasaan teknologi informasi, pengelolaan sumberdaya, dan aksesibilitas sumberdaya baik bahan baku, pasar, maupun permodalan⁴². Dengan daya saing yang tinggi, potensi UMKM dapat bertahan dalam persaingan pasar akan menjadi tinggi, begitu juga sebaliknya.

Sayangnya, rata-rata daya saing UMKM di Indonesia relatif masih belum terlalu tinggi. Gambar 01 mengungkapkan bahwa indeks daya saing UMKM Indonesia masih berada di urutan keempat dari negara-negara ASEAN dengan skor masih 4,10 poin⁴³. Indonesia masih kalah dengan Singapura (5,43 poin), Malaysia (5,01 poin), dan Thailand (4,47 poin). Indonesia hanya mempunyai selisih sedikit dengan Filipina (4,08 poin) dan Vietnam (3,47 poin). Peningkatan tersebut didasarkan pada beberapa indikator, diantaranya: (i) kebijakan terkait diklat; (ii) kemudahan pendirian *start up*; (iii) iklim usaha; (iv) ketersediaan keahlian; (v) kebijakan insentif dan perpajakan; (vi) integrasi pasar; (vii) penguasaan teknologi; dan (viii) model pengembangan rantai nilai. Dengan indeks daya saing yang relatif rendah, maka beberapa indikator penentu daya saing UMKM pada dasarnya belum optimal dilakukan, atau dengan kata lain masih terjadi problem permasalahan yang relatif kompleks.

³⁸ Ilham, M., & Hariyani, I. 2020. Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 3(2), 257-270.

³⁹ *Ibid.*

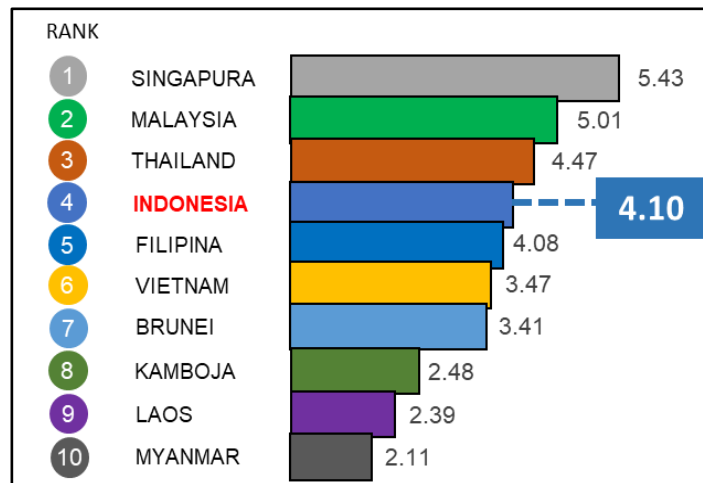
⁴⁰ Bahtiar, R.A. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XIII(10), 19-24, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ ASEAN SME Policy Index. 2018. *SME Policy Index, Boosting Competitiveness and Inclusive Growth*. OECD Publishing: Jakarta.

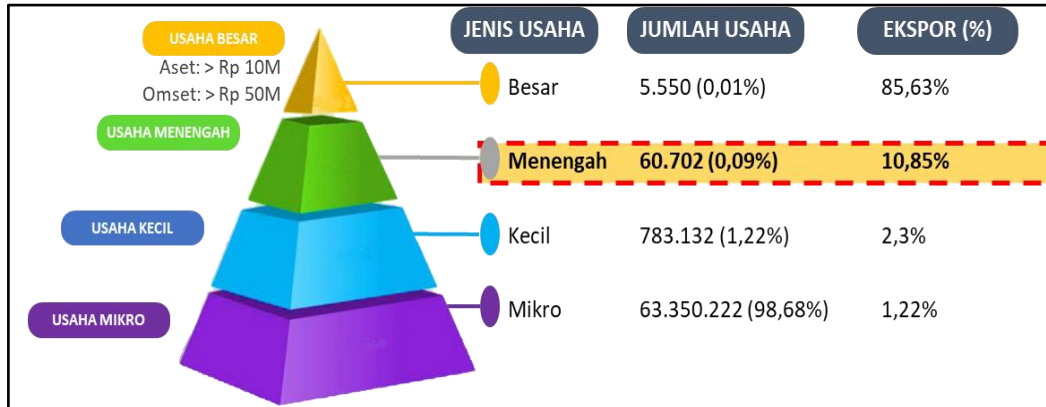
Gambar 01. Indeks Daya Saing UMKM di ASEAN



Sumber: ASEAN SME Policy Index (2018)

Dari total UMKM di Indonesia, jumlahnya didominasi oleh skala mikro yang mencapai 63,35 juta pelaku atau sebesar 98,68 persen, kemudian diikuti oleh skala kecil sebesar 783 ribu (1,22 persen), dan skala menengah sebesar 60,70 ribu (0,09 persen). Sementara untuk pelaku usaha skala besar hanya berjumlah 5.550 atau hanya 0,01 persen dari total pelaku usaha di Indonesia⁴⁴.

Gambar 02. Profile Skala Usaha di Indonesia



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Meski jumlah pelaku usaha skala mikro mendominasi, namun kontribusinya terhadap total ekspor hanya sebesar 1,22 persen, jauh dibandingkan kontribusi pelaku usaha skala kecil sebesar 2,3 persen, skala menengah sebesar 10,85 persen, dan pelaku usaha skala besar yang mencapai 85,63 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa total jumlah UMKM di Indonesia yang didominasi oleh pelaku usaha skala mikro kurang mempunyai daya saing usaha. Kondisi ini menegaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 akan sangat berisiko terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Dengan daya

⁴⁴ Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. *Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan UMKM*. Power Point disampaikan dalam rapat koordinasi, Kamis 07 Oktober 2020.

saing yang rendah, situasi pandemi diyakini berdampak lebih massif terhadap penurunan kinerja UMKM.

Selain itu, rendahnya daya saing usaha UMKM masih belum mampu didorong oleh model kemudahan aksesibilitas pembiayaan. Tabel 01 menjelaskan bahwa indeks daya saing sistem keuangan di Indonesia masih relatif jauh tertinggal dengan negara-negara lain di ASEAN⁴⁵. Pada rasio kredit terhadap PDB misalnya, peringkat Indonesia masih berada di urutan 87, jauh di bawah Malaysia berada di urutan 19 dan Thailand yang sudah berada di urutan 11. Untuk rasio pembiayaan UMKM, Indonesia masih berada di urutan 31, bandingkan dengan Thailand di urutan 29, dan Malaysia yang sudah menduduki urutan 9. Indikator lain juga mencerminkan kondisi yang tidak jauh berbeda, dan merepresentasikan rendahnya aksesibilitas pembiayaan keuangan, khususnya terhadap UMKM. Fakta tersebut juga mencerminkan bahwa sasaran dari banyaknya program pembiayaan bagi UMKM ternyata belum cukup mengangkat peringkat daya saing pembiayaan di Indonesia.

Tabel 01. Indeks Daya Saing Sistem Keuangan

No	Aspek	Indonesia	Thailand	Malaysia
		Rank	Rank	Rank
1	Rasio Kredit Terhadap PDB	87	11	19
2	Rasio Pembiayaan UMKM	31	29	8
3	Ketersediaan Modal Ventura	37	34	9
4	Rasio Kapitalisasi Pasar Modal Terhadap PDB	42	14	8
5	NPL Gross Total Loan	45	56	19
6	Gap Kredit	1	1	1

Sumber: SME Competitiveness Outlook, 2019

Dari beragam kondisi di atas, hantaman pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan yang signifikan terhadap kinerja UMKM akibat daya saing yang rendah dan kerapuhan imunitas usaha. Bukti empiris mengungkapkan setidaknya terdapat lima masalah UMKM akibat pandemi Covid-19, yaitu⁴⁶: (i) penurunan penjualan; (ii) masalah permodalan; (iii) inefisiensi distribusi; (iv) kesulitan bahan baku; dan (v) kegiatan produksi yang terhambat. Sementara rilis lain menjelaskan bahwa permasalahan UMKM akibat pandemi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dampak terhadap aspek keuangan dan non keuangan⁴⁷. Permasalahan UMKM dari aspek non keuangan saat pandemi diantaranya adalah⁴⁸: (i) tidak mampu berproduksi akibat terhambatnya aksesibilitas bahan baku; (ii) harga bahan baku mengalami peningkatan; (iii) berkurangnya pesanan/permintaan; dan (iv) kesulitan mendistribusikan produk. Sementara untuk aspek keuangan permasalahannya adalah⁴⁹: (i) sulit membayar gaji pekerja; (ii) pengeluaran tetap; (iii) pembayaran tagihan; (iv)

⁴⁵ SME Competitiveness Outlook 2019. 2019. *Big Money for Small Business, Financing the Sustainable Development Goals*. International Trade Centre: Geneva, Switzerland.

⁴⁶ Hardilawati, W.A. 2020. Strategi bertahan umkm di tengah pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 10, No. 1, pp. 90-98.

⁴⁷ Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM, Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha bagi UMKM Indonesia*. https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2020/12/BAPPENAS-Penanggulangan-Dampak-Covid-19-terhadap-UMKM-Final-v1_0.pdf.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

pembayaran utang usaha; dan (v) pinjaman bank dalam masa kontrak yang tidak dapat diperpanjang.

Sementara, hasil rapid survey yang lain menemukan bahwa kondisi UMKM akibat pandemi Covid-19 dapat diklasifikasikan menjadi tiga kondisi⁵⁰. *Pertama*, sebanyak lebih dari 60 persen usaha mikro dan kecil di Indonesia telah mengurangi tenaga kerja, terutama pada bisnis manufaktur. Sementara itu lebih dari 50 persen usaha menengah tetap menjaga jumlah karyawannya. *Kedua*, sebesar 88 persen usaha mikro tidak memiliki kas, tabungan, dan telah kehabisan uang. Sebesar 88 persen usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemik. Akses pada pembiayaan formal masih sangat terbatas, dan sebesar 39 persen UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman keluarga. *Ketiga*, sebesar 50 persen pelaku UMKM telah menutup usahanya. Dalam hal ini, usaha menengah merasakan dampak akibat pengiriman produk yang terhambat, dirupsi pada rantai pasokan, dan kontrak yang dibatalkan.

Dari beragam permasalahan di atas, akar masalah UMKM di masa pandemi pada dasarnya diakibatkan oleh usaha yang bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung, sehingga pembatasan aktivitas menyebabkan permintaan pasar menjadi menurun signifikan⁵¹. Beragam permasalahan UMKM di masa pandemi menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan (berkisar 40-80 persen) dan menjadi salah satu penyebab utama UMKM mengalami kesulitan keuangan⁵². Sementara itu, ekosistem pembiayaan di Indonesia sejauh ini masih belum optimal dalam mendorong pemulihan UMKM di masa pandemi.

E. Persoalan Rendahnya Aksesibilitas Pembiayaan UMKM

Dari sekian banyak ragam permasalahan UMKM di masa pandemi Covid-19, salah satu permasalahan terberat terletak pada masih rendahnya aksesibilitas pembiayaan. Hasil rapid survey yang dilakukan oleh ADB (2020)⁵³ menemukan bahwa di masa pandemi, 90 persen UMKM di Indonesia membutuhkan pembiayaan agar dapat memulai lagi usahanya. Kebijakan yang paling diharapkan dari para pelaku UMKM adalah: (i) sebanyak 91,8 persen UMKM mengharapkan pinjaman tanpa bunga dan/atau tanpa agunan; dan (ii) sebanyak 89,5 persen UMKM mengharapkan bantuan tunai langsung atau hibah. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas (2020)⁵⁴, UMKM membutuhkan tambahan modal kerja untuk pemulihan dan merencanakan pinjaman dari perbankan sebagai sumber akses pendanaan.

Namun untuk mendapatkan bantuan aksesibilitas pembiayaan, UMKM rata-rata mengalami kesulitan akibat rendahnya kredibilitas, serta tidak adanya aset sebagai kolateral⁵⁵. Sementara mengandalkan hibah atau bantuan dari pemerintah bukan strategi

⁵⁰ ADB (Asian Development Bank). 2020. *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020, Covid-19 Impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia*. Asian Development Bank: Metro Manila, Philippines.

⁵¹ Trimulato. 2020. Pengembangan Umkm Melalui Fintech Syariah Di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, pp. 65-85.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Notalin, E., Afrianty, N., & Asnaini. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (Jam-Eksis)*, Vol. 4, No. 1, pp. 169-178.

yang tepat, berkenaan adanya keterbatasan anggaran fiskal. Padahal, pemulihan UMKM sangat mendesak karena peranannya diharapkan mampu mengembalikan kinerja perekonomian lokal dan penyediaan lapangan kerja selama pandemi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan yang tepat dalam mendorong pemulihan kondisi UMKM agar peran dan fungsinya bagi perekonomian nasional kembali berjalan.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa tingginya kerentanan usaha UMKM menjadikan para pelakunya sulit mengakses pembiayaan akibat kapasitas usaha yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kredit⁵⁶. UMKM dikategorikan sebagai pelaku usaha yang rentan, sehingga tingkat pengembalian kredit atau pembiayaan menjadi rendah. Meski demikian, pendapat lain justru menyatakan bahwa rendahnya pembiayaan pada UMKM lebih disebabkan oleh kurangnya intensitas lembaga keuangan dalam memberikan kredit atau pembiayaan terhadap para pelaku UMKM⁵⁷. Lembaga pembiayaan kurang mampu beradaptasi dalam menghasilkan produk dan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa rendahnya aksesibilitas pembiayaan kepada UMKM sama-sama disebabkan oleh dua sisi, baik dari sisi permintaan (pelaku UMKM) maupun penawaran (lembaga keuangan). Terlepas dari perdebatan tersebut, aksesibilitas pembiayaan menjadi persoalan serius bagi UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya.

Persoalan rendahnya aksesibilitas pembiayaan UMKM tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir seluruh UMKM di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Secara umum, keterbatasan aksesibilitas pembiayaan pada UMKM disebabkan oleh keterbatasan informasi antara sumber pembiayaan potensial dengan kebutuhan UMKM. Pendapat lain menyatakan akar persoalannya terletak pada rendahnya kapasitas UMKM sehingga diragukan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti perbankan dituntut selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian⁵⁸. Sementara, komposisi lembaga keuangan di negara-negara Asia banyak didominasi oleh perbankan⁵⁹. Meskipun kesehatan sistem perbankan telah meningkat secara signifikan sejak krisis Asia, bank-bank telah berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM⁶⁰. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa rata-rata UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses keuangan karena adanya fragmentasi pasar keuangan dari perbankan. Tingginya perspektif risiko pembiayaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan kemungkinan akan mempengaruhi biaya pembiayaan pada UMKM. Dampaknya, lembaga pembiayaan khususnya perbankan seringkali mematok bunga tinggi pada UMKM untuk menutupi potensi risiko yang juga tinggi. Kasus tersebut menjadi ekosistem yang kurang menguntungkan bagi pengembangan UMKM yang sangat tergantung pada aksesibilitas pembiayaan.

Pendapat lain menyatakan bahwa rendahnya aksesibilitas pembiayaan disebabkan rendahnya produk dan jasa layanan keuangan yang kurang inklusif dan mendalam. Sumber aksesibilitas pembiayaan rata-rata masih bersumber dari satu karakter pembiayaan, contohnya hanya mengandalkan kredit konvensional tanpa

⁵⁶ Wlodarczyk, B., Szturo, M., Lonescu, G.H., Firoiu, D., Pirvu, R., & Badircea, R. 2018. The Impact Of Credit Availability on Small And Medium Companies. *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 5(3), 565-580, <https://www.researchgate.net/publication/324230465> The impact of credit availability on small and medium companies.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Yoshino, N., & Hesari, F.T. 2017. Solution For Small And Medium-Sized Enterprises Difficulties In Accessing Finance: Asian Experience. *ADB Working Paper Series*, 768.

⁶⁰ *Ibid.*

mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah. Contoh lainnya adalah fragmentasi kredit yang sangat memilih sektor tertentu (contohnya memprioritaskan sektor perdagangan dibandingkan pertanian), sehingga inklusi keuangan kurang bisa diciptakan secara optimal. Beberapa persoalan tersebut lebih mengarah pada problem sisi penawaran, karena rendahnya upaya lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menyasar segmen pasar UMKM. Namun, persoalan yang lebih mendalam sebenarnya terletak pada sisi informasi yang kurang simetris antara lembaga keuangan dengan UMKM. Ketidaktahuan UMKM dalam memilih akses pembiayaan yang layak menjadi kendala terbesar, sementara dari sisi lembaga keuangan seringkali terjadi misinformasi mengenai potensi UMKM yang tidak selalu dikorelasikan dengan kerentanan kredit.

Terbatasnya aksesibilitas pembiayaan mampu menciptakan efek yang merugikan, bukan hanya ditemui di Indonesia, namun mayoritas UMKM di seluruh dunia. Contohnya kasus di Uganda, persoalan aksesibilitas pembiayaan menyebabkan nilai aset menjadi rendah, termasuk produktivitas dan nilai penjualan, akibat terbatasnya ukuran modal⁶¹. Kasus di banyak negara Asia Selatan, kurangnya aset yang terus menerus dan fondasi keuangan yang lemah akibat keterbatasan pembiayaan sering menyulitkan UMKM untuk melakukan dan memperluas skala operasional⁶². Akibatnya, modal ekuitas yang tidak memadai yang diinvestasikan dalam operasional usaha membuat para pelaku UMKM lebih bergantung pada sumber lain seperti pinjaman bank dan jenis kredit keuangan lainnya. Sementara, pihak perbankan mayoritas mempunyai prinsip pengetatan penyaluran kredit, sehingga sebagian besar UMKM mengandalkan pembiayaan internal. Pada sisi yang lain, pinjaman internal sangat terbatas, yang terkadang melibatkan suntikan modal baru dari pemegang saham, tabungan pribadi pemilik, dan laba ditahan atau mengandalkan dari anggota keluarga.

F. Peranan Lembaga Pembiayaan Syariah

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa tantangan terberat para pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 terletak pada rendahnya tingkat aksesibilitas pembiayaan. Salah satu akar permasalahan bukan hanya terletak dari sisi permintaan, namun lebih kepada masih rendahnya inklusi dan pendalaman keuangan. Dampaknya, diversifikasi atau alternatif pembiayaan menjadi rendah, termasuk masih rendahnya peluang pembiayaan syariah yang sebenarnya sangat potensial.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong pemulihan UMKM adalah menyediakan alternatif model pembiayaan, yang dapat diwujudkan melalui optimalisasi pembiayaan syariah. Kebutuhan UMKM yang memerlukan model pembiayaan yang mudah dan berkeadilan pada masa hantaman pandemi Covid-19 dianggap kompatibel dengan karakteristik pembiayaan syariah yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan asas tidak saling mendzalimi antar pihak yang bertransaksi. Hal ini dinilai sesuai dengan kondisi UMKM saat terjadi hantaman pandemi, dimana mereka membutuhkan aksesibilitas permodalan yang berkeadilan dan mampu mengcover kelemahan-kelemahan usaha UMKM.

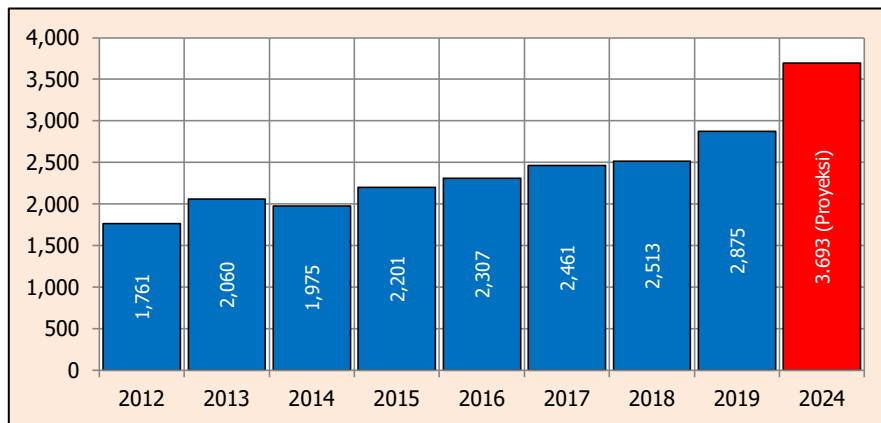
Strategi pembiayaan syariah bagi UMKM sangat relevan, mengingat kasus di tingkat global, perkembangan keuangan syariah berjalan sangat pesat. Kondisi tersebut bisa ditangkap sebagai peluang bagi pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia.

⁶¹ Eton, M., Mwosi, F., Mutesigensi, D., & Ebong, C.D. Credit Financing And Performance Of Smes In Lira Municipality, Uganda. *Research Journal of Financing and Accounting*, 8(8), 121-127.

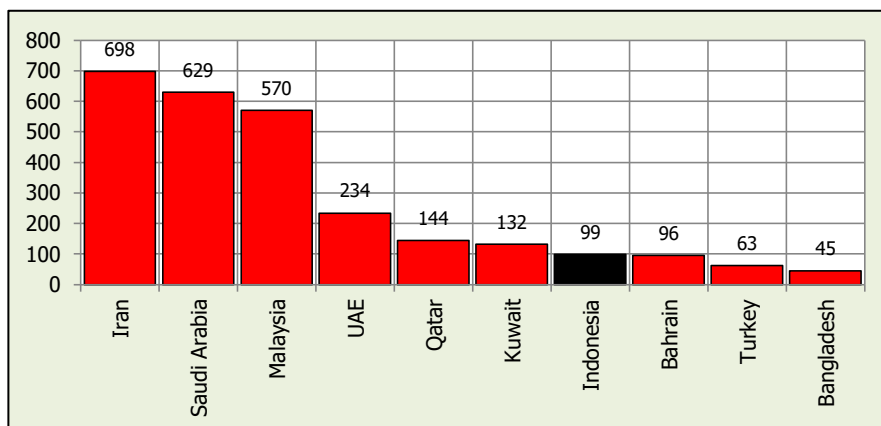
⁶² Wehinger, G. 2013. Smes And The Credit Crunc: Current Financing Difficulties, Policy Measures And A Review Of Literature. *OECD Journal: Financial Market Trends*, 2, 1-34.

Pada tahun 2012 misalnya, jumlah aset keuangan syariah di tingkat global masih sebesar US 1.761 Milyar, kemudian tahun 2014 menjadi US 1.975 Milyar, tahun 2016 berkembang menjadi US 2.307 Milyar, tahun 2018 meningkat menjadi US 2.513 Milyar, dan tahun 2019 menjadi US 2.875 Milyar. Pada tahun 2024, diproyeksikan total aset keuangan syariah di tingkat global menjadi US 3.693 Milyar⁶³. Perkembangan tersebut mayoritas didistribusikan pada keuangan perbankan sebesar 69 persen, sukuk sebesar 19 persen, dan sisanya untuk instrumen keuangan syariah lainnya. Distribusi tersebut mencerminkan bahwa aset keuangan syariah mayoritas diperuntukkan bagi kegiatan pembiayaan. Peluang pembiayaan syariah di tingkat global juga dapat berimplikasi ke Indonesia, sehingga pembiayaan syariah ke depan pada dasarnya sangat potensial.

Gambar 03. Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global (US Milyar)



Gambar 04. Negara Dengan Kepemilikan Aset Keuangan Syariah Terbesar di Tingkat Global (US Milyar)



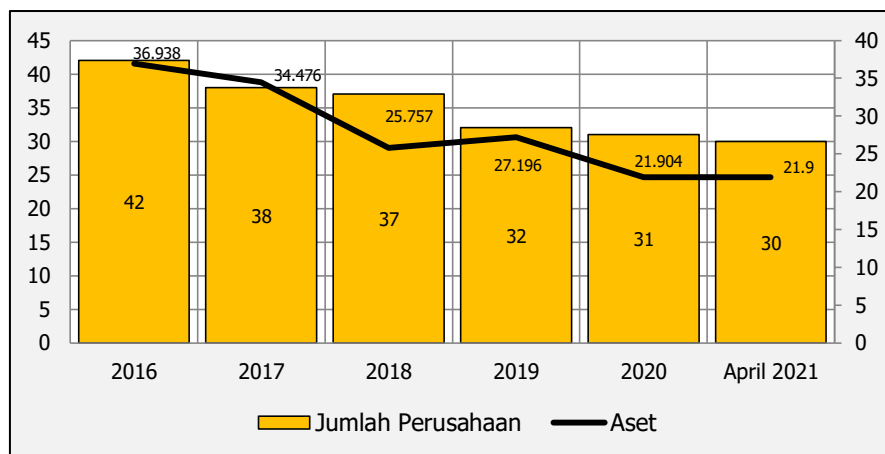
Sementara untuk aspek kepemilikan aset keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan kepemilikan aset keuangan syariah sebesar US 99 Milyar. Peringkat pertama diduduki oleh Iran (US 698 Milyar), kemudian Saudi Arabia (US 629 Milyar), Malaysia (US 570 Milyar), UAE (US 234 Milyar), Qatar (US 144 Milyar), dan Kuwait (US 132 Milyar). Data ini mencerminkan bahwa perkembangan keuangan

⁶³ Islamic Finance Development Report 2020. 2020. *Progressing Through Adversity*. https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf

syariah di Indonesia masih belum diikuti oleh strategi peningkatan jumlah aset. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi pengembangan pembiayaan syariah, termasuk mengoptimalkan peranannya dalam mendorong pemulihan UMKM di masa pandemi.

Perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia pada dasarnya masih perlu dorongan agar tata kelolanya dapat optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selama tahun 2016 sampai dengan bulan April 2021, jumlah perusahaan lembaga pembiayaan syariah relatif terus menurun, yang mencerminkan tata kelola usahanya selama ini kurang optimal. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah aset, dimana tahun 2016 masih sebesar Rp. 36,93 Trilyun, namun hingga bulan April 2021 asetnya menurun menjadi Rp. 21,9 Trilyun⁶⁴. Maka dari itu, lembaga pembiayaan syariah perlu direvitalisasi, salah satunya dengan pendalaman dan inklusi keuangan, khususnya dalam menysasar segmen UMKM. Tata kelola lembaga pembiayaan syariah selama ini dinilai kurang mencerminkan keunggulan lembaga pembiayaan syariah yang seharusnya mampu mereduksi kerentanan risiko yang biasanya melekat pada karakter kredit konvensional⁶⁵. Beberapa kelemahan penyebab masih rendahnya tata kelola pembiayaan syariah adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang memahami prinsip syariah dan fiqh muamalah⁶⁶.

Gambar 05. Perkembangan Jumlah Perusahaan (Unit) dan Aset (Rp. Trilyun) Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia



Sumber: OJK, April 2021

Perkembangan kinerja lembaga pembiayaan syariah berbanding terbalik dengan kepemilikan aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dimana setiap tahunnya justru mengalami perkembangan yang relatif signifikan. Pada tahun 2016, jumlah kepemilikan aset LKMS masih sebesar Rp. 63,00 Milyar, kemudian tahun 2017 naik menjadi Rp. 220,74 Milyar, tahun 2018 naik lagi menjadi Rp. 278,29 Milyar, tahun 2019 menjadi Rp. 403,00 Milyar, tahun 2020 naik signifikan menjadi Rp. 499,70 Milyar, dan hingga april 2021 tetap sebesar tahun 2020. Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa tata kelola LKMS relatif lebih baik, khususnya dalam menysasar pembiayaan skala mikro (UMKM). Data tersebut juga mencerminkan bahwa LKMS

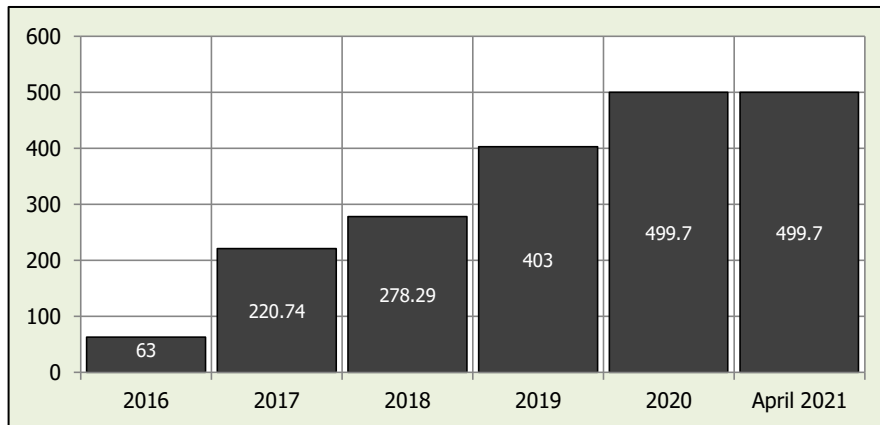
⁶⁴ OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 2021. *Statistik IKNB Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

mempunyai probabilitas keberhasilan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan pembiayaan yang menasar segmen non mikro.

Gambar 06. Perkembangan Aset (Rp. Milyar) LKMS di Indonesia



Berdasarkan perkembangan data pembiayaan syariah di atas, maka strategi mengoptimalkan peran pembiayaan syariah dalam mendorong dan mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi semakin relevan dan dibutuhkan. Strategi pembiayaan syariah mempunyai peranan penting dalam mendiversifikasi pembiayaan dan mendorong model pembiayaan yang merata, berkeadilan, dan mampu mendongkrak kinerja UMKM.

G. Mengoptimalkan Keunggulan Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa peluang pembiayaan syariah di Indonesia masih sangat tinggi, khususnya dalam mendorong percepatan pemulihan UMKM pada saat pandemi Covid-19. Pembiayaan syariah diyakini mampu memitigasi risiko dari persoalan *shock* eksternal, sehingga mampu meminimalisir tingkat kerugian. Mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi dan merespons tanggung jawab atas setiap respons risiko. Berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, risiko harus ditanggung bersama oleh penyedia modal dan peminjam, dan tidak memungkinkan mengalihkan risiko hanya pada satu pihak⁶⁷. Semuanya mengarah pada penciptaan kekayaan, kesejahteraan, dan pengembangan bisnis. Orientasi tersebut membantu meningkatkan kerjasama dan mengurangi aliran informasi asimetris, *moral hazard*, dan spekulasi diantara pihak-pihak yang terlibat kontrak pembiayaan syariah. Penerapan nilai-nilai moral dan etika terutama oleh lembaga pembiayaan dan UMKM dapat mengurangi berbagai risiko yang terlibat dalam transaksi. Proses tersebut tetap mengedepankan evaluasi, pemantauan, dan pengawasan yang tepat terhadap bisnis atau proyek yang dijalankan, khususnya pada kasus UMKM.

Keunggulan pembiayaan syariah dalam memitigasi risiko dapat dilihat dari model bisnis kemitraan yang saling menguntungkan sebagai sarana permodalan dalam membantu masyarakat khususnya UMKM agar mampu keluar dari resesi. Pembiayaan syariah mengedepankan prinsip keadilan melalui jenis-jenis akad pembiayaan yang dipakai. Metode bagi hasil yang diterapkan menjadikan pembiayaan syariah tidak

⁶⁷ *Ibid.*

tergantung pada tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI). Hal ini didukung dengan prinsip yang dipakai dalam tata kelolanya, berupa nilai-nilai moral dan spiritual yang menyatukan keseimbangan antara pengelolaan dari sisi penawaran dan permintaan. Selain itu juga terdapat prinsip keadilan, kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab⁶⁸. Kondisi demikian diyakini mampu memulihkan resesi keuangan akibat dampak pandemi.

Pembiayaan syariah mempunyai peranan dalam menyediakan aksesibilitas pembiayaan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan demokrasi ekonomi, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil, sewa, atau skema jual beli dan dengan ragam akad yang ditawarkan dirancang untuk menciptakan terbinanya kebersamaan dan kemitraan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana atau pemodal (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga pembiayaan syariah. Dalam mekanisme tersebut, lembaga pembiayaan selaku pengelola dana yang terkumpul (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana bisa berstatus sebagai peminjam dana atau pengelola usaha yang berstatus sebagai mitra usaha⁶⁹.

Pada dasarnya, pengembangan pembiayaan syariah bisa dilakukan karena mempunyai keunggulan dibandingkan konvensional. Identitas dari pembiayaan syariah adalah tidak ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak lain, dan tidak ada perlakuan yang sepihak atau represif kepada pihak lain⁷⁰. Kondisi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian bisa dicover oleh model pembiayaan syariah untuk meredam potensi perselisihan antara para pihak yang bertransaksi. Konsep pembiayaan syariah menawarkan kesiapan kepada para pihak agar lebih siap terhadap kondisi yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan⁷¹.

Pengembangan pembiayaan syariah dapat diperluas dengan konsep Fintech syariah, dan mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan transaksi e-commerce. Contoh yang bisa dilakukan adalah melakukan optimalisasi pembiayaan bagi transaksi digital. Bank Indonesia (BI) mengkalkulasi bahwa transaksi e-commerce di masa pandemi meningkat kurang lebih Rp. 429 Triliun sepanjang tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp. 205,5 Triliun⁷². Fakta tersebut menunjukkan bahwa pasar UMKM terbuka lebar bagi transaksi e-commerce, sehingga bisnisnya bisa terus berjalan.

H. Penutup

Selama ini, sudah cukup banyak skema pembiayaan yang ditawarkan kepada beragam skala usaha, namun tidak mendorong UMKM naik kelas akibat aksesibilitas permodalan yang terbatas. Pembiayaan syariah dapat menutupi persoalan tersebut karena menjalankan operasionalisasi usaha berdasarkan prinsip kesetaraan dan menghindari model transaksi yang represif. Keunggulan ini mampu menciptakan skema

⁶⁸ Thaker, M.A., Thaker, H.B., Pitchay, A.B., Amin, M.F., & Khaliq, A.B. 2020. Leveraging Islamic Banking And Finance For Small Businesses: Exploring The Conceptual And Practical Dimensions. *ADB Working Paper Series*, No. 1156.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hafizah, G.D. 2020. Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Likuid*, 1(1), 56-64.

⁷² www.keuangan.kontan.co.id. 15 Januari 2021. *Inklusi Perbankan Terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/inklusi-perbankan-terhadap-umkm-di-masa-pandemi-covid-19>.

pembiayaan bisa mendorong UMKM meningkatkan skala usaha. Dengan prinsip kesetaraan berbasis akad dan model pembiayaan yang menghindari corak represif, UMKM mampu mengalokasikan kemampuan terbaiknya bagi pengembangan usaha, seperti penciptaan inovasi, efisiensi produksi, dan strategi memperluas jangkauan pemasaran.

Hanya saja, pengelolaan lembaga keuangan syariah mayoritas mengandalkan sumberdaya manusia yang berasal dari latar belakang keuangan konvensional, sehingga keunggulan dari prinsip syariah kurang bisa berjalan dengan baik. Praktik lembaga keuangan syariah dinilai belum benar-benar mengadopsi konsep syariah secara murni akibat pengetahuan manajemen pengelolaan yang terbatas. Untuk itu, diperlukan peningkatan sumberdaya manusia yang kompeten di sektor industri keuangan syariah. Permasalahan lain adalah masih kurang optimalnya strategi kebijakan yang mampu mengintervensi inklusi dan pendalaman keuangan yang difokuskan pada pembiayaan syariah. Beberapa kelemahan tersebut menyebabkan keunggulan yang dimiliki relatif belum bisa berdampak pada peningkatan kinerja penawaran (pelaku sektor keuangan syariah) maupun permintaan (masyarakat selaku konsumen).

Dari sisi permintaan, permasalahan yang umum ditemui pada UMKM adalah karakteristik risiko usaha yang tinggi bagi pemilik modal atau pelaku sektor keuangan (*shahibul maal*). Hal ini bisa diatasi oleh lembaga pembiayaan syariah dengan mengefektifkan lembaga pembiayaan syariah sebagai *offtaker/agregator*. Pengertian agregator adalah menghubungkan antara permintaan (defisit keuangan) dengan sumber penawaran (surplus keuangan) yang diimbangi dengan keunggulan akad-akad yang dimiliki. Permasalahan berikutnya yang sering ditemui pada UMKM adalah modal kerja cenderung jangka pendek dan tidak berdampak pada peningkatan aset debitur, sehingga jumlahnya jauh lebih banyak dari pembiayaan investasi.

Berdasarkan permasalahan faktual, maka pembiayaan syariah harus dikondisikan agar sesuai dengan kebutuhan usaha (*business nature*), dilengkapi dengan model pemberdayaan sebagai bagian dan konsekuensi dari skema pembiayaan skala mikro. Semua skema tersebut dapat optimal jika ekosistem keuangan syariah bisa diciptakan secara optimal. Pengertian ekosistem keuangan syariah adalah beragam kondisi eksternal yang sangat terkait, seperti regulasi, pemangku kepentingan, dan para pelaku yang terlibat secara langsung dalam transaksi keuangan syariah. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong ekosistem keuangan syariah sebagai fondasi dalam mengembangkan lembaga pembiayaan syariah untuk mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi. Waktu yang mendesak mengharuskan adanya produk regulasi atau peraturan yang cepat dalam mendorong perbaikan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengoptimalkan peran lembaga pembiayaan syariah bagi percepatan pemulihan UMKM di masa pandemi.

Referensi

- ADB (Asian Development Bank). 2020. *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020, Covid-19 Impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia*. Asian Development Bank: Metro Manila, Philippines.
- Alharbi, R.K., Yahya, S.B., & Ahmed, E.R. 2018. Characteristics of manager's and smes performance: the role of access to finance as a moderator. *International journal of Engineering & Technology*, 7(4), 5115-5119.
- Amri, A. 2020. Dampak covid-19 terhadap umkm di indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/605>.
- Anggraini, R., & Putri, D.A. 2020. Kajian kritis ekonomi syariah dalam menelisik kebijakan moneter sebagai upaya penyelamatan perekonomian di tengah pandemi corona virus disease-19. *Jurnal Bonanza: Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 80-97.
- ASEAN SME Policy Index. 2018. *SME Policy Index, Boosting Competitiveness and Inclusive Growth*. OECD Publishing: Jakarta.
- Bahtiar, R.A. 2021. Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XIII(10), 19-24, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf.
- Belas, J., Gavurova, B., & Toth, P. 2018. Impact of selected characteristics of smes on the capital structure. *Journal of Business Economics and Management*, 19(4), 592-608.
- Cepel, M., Gavurova, B., Dvorsky, J., & Belas, J. 2020. The impact of the covid-19 crisis on the perception of business risk in the sme segment. *Journal of International Studies*, 13(3), 248-263. https://www.jojs.eu/files/16_1021_Cepel%20et%20al.pdf.
- Dewi, L., & Christian, S. 2017. The effect of entrepreneurial attitude and managers business ability on smes organizational performance. *Journal of Entrepreneur and Entrepreneurship*, 6(1), 13-16.
- Eton, M., Mwosi, F., Mutesigensi, D., & Ebong, C.D. Credit financing and performance of smes in lira municipality, uganda. *Research Journal of Financing and Accounting*, 8(8), 121-127.
- Hadiwardoyo, W. 2020. Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. *BASKARA, Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92, jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara.
- Hakim, L., Aureli, A.B.P., Adam, Z., Sagita, I.A., Anisah, F.N., Nusantara, C.T.A., & Amin, A.A. 2021. Analisa keberlanjutan BMT dalam pandemi covid 19 berbasis bisnis model dan pemilihan pelayanan anggota pembiayaan (selective lending). *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 17-33, <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/article/view/1135/1120>.
- Hardilawati, W.A. 2020. Strategi bertahan umkm di tengah pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 90-98.
- Hafizah, G.D. 2020. Peran ekonomi dan keuangan syariah pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Likuid*, 1(1), 56-64.
- Ilham, M., & Hariyani, I. 2020. Memahami peran lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan umkm pada masa pandemi covid-19. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 3(2), 257-270.

- Islamic Finance Development Report 2020. 2020. *Progressing Through Adversity*. https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. *Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan UMKM*. Power Point disampaikan dalam rapat koordinasi, Kamis 07 Oktober 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM, Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha bagi UMKM Indonesia*. https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2020/12/BAPPENAS-Penanggulangan-Dampak-Covid-19-terhadap-UMKM-Final-v1_0.pdf.
- Lekhaya, L.M. 2016. Business characteristics of small and medium enterprises in rural areas: a case study on southern region of kwazulu-natal province of south africa. *Problems and Perspectives in Management*, 14(3), 108-114.
- Muriithi, S.M. 2021. The impact of covid-19 on african smes, possible remedies and source of funding. *European Journal of Research and Reflection in Management Science*, 9(1), 1-12, https://www.researchgate.net/publication/348994142_THE_IMPACT_OF_COVID-19_ON_AFRICAN_SMES_POSSIBLE_REMEDIES_AND_SOURCE_OF_FUNDING
- Nawaiseh, K.H. 2021. The effect of covid-19 pandemic on smes management in jordan. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 20-29, https://www.researchgate.net/publication/348976086_The_Effect_Of_COVID-19_Pandemic_On_SMEs_Management_In_Jordan.
- Notalin, E., Afrianty, N., & Asnaini. 2021. Dampak covid-19 terhadap tingkat efisiensi kinerja keuangan bank umum syariah di indonesia menggunakan pendekatan data envelopment analysis (dea). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (Jam-Eksis)*, Vol. 4, No. 1, pp. 169-178.
- Nugrahana, Y.R.Y., & Zaki, I. 2020. The Role of micro waqf bank in the pandemic era of covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(9), 1.731-1.742.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 2021. *Statistik IKNB Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.
- Sari, R., Bulutoding, L., Aditiya, R., & Jannah, R. 2020. Equity crowdfunding for SMEs: sharia compliance challenge amid the covid-19 pandemic. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 198-213.
- SME Competitiveness Outlook 2019. 2019. *Big Money for Small Business, Financing the Sustainable Development Goals*. International Trade Centre: Geneva, Switzerland.
- Supriatna, E. 2020. Socio-economic impacts of the covid-19 pandemic: the case of bandung city. *Journal of Governance*, 5(1), 61-70.
- Susilawati., Falefi, R., & Purwoko, A. 2020. Impacts of covid-19's pandemic on the economy of indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1147-1156.
- Thaker, M.A., Thaker, H.B., Pitchay, A.B., Amin, M.F., & Khaliq, A.B. 2020. Leveraging islamic banking and finance for small businesses: exploring the conceptual and practical dimensions. *ADB Working Paper Series*, No. 1156.

- Trimulato. 2020. Pengembangan umkm melalui fintech syariah di tengah wabah covid-19. *Al Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 65-85.
- Vidal, G.G., Vilar, L.G., Rodriguez, A.S., Vivar, R.M., Campdesuner, R.P., & Ruiz, F.U. 2020. Facing post era covid-19 era, what is really important for ecuadorian smes?. *International journal of Engineering Business Management*, 12, 01-09, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1847979020971944>.
- Wehinger, G. 2013. Smes and the credit crunch: current financing difficulties, policy measures and a review of literature. *OECD Journal: Financial Market Trends*, 2, 1-34.
- Wlodarczyk, B., Szturo, M., Lonescu, G.H., Firoiu, D., Pirvu, R., & Badircea, R. 2018. The impact of credit availability on small and medium companies. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 5(3), 565-580, https://www.researchgate.net/publication/324230465_The_impact_of_credit_availability_on_small_and_medium_companies.
- www.ekonomi.bisnis.com. 2021. Covid-19 Mengganas, Bos BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021. Online. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210705/9/1413729/covid-19-mengganas-bos-bi-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii2021>.
- www.keuangan.kontan.co.id. 2021. Inklusi Perbankan Terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19. <https://keuangan.kontan.co.id/news/inklusi-perbankan-terhadap-umkm-di-masa-pandemi-covid-19>.
- www.tribunnews.com. 2021. Update Corona Global 30 Juni 2021: Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Lebih dari 3,9 Juta. Online. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/30/update-corona-global-30-juni-2021-jumlah-kematian-akibat-covid-19-lebih-dari-39-juta>.
- www.ners.unair.ac.id. 2021. Bedanya Endemi, Epidem, dan Pandemi. Online. <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.
- Yoshino, N., & Hesari, F.T. 2017. Solution for small and medium-sized enterprises difficulties in accessing finance: asian experience. *ADB Working Paper Series*, 768.
- Yuliana. 2020. Corona virus deasese (covid-19); sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187-192, <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>.